

Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir DKI Jakarta

Aditya Maulana Mugiraharjo¹, Lin Yola²

^{1,2} Kajian Pengembangan Perkotaan, Universitas Indonesia, Indonesia
e-mail: aditya.maulana02@ui.ac.id

Abstrak

Perubahan iklim dan pemanasan global mempengaruhi beberapa wilayah pesisir di dunia. Makalah ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan kawasan pesisir di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia dengan pendekatan tata kelola kolaboratif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif, yang sangat berguna untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang penelitian ini. Pada akhirnya, penulis menyarankan 4 skenario tindakan tata kelola kolaboratif yang harus dilakukan oleh multi aktor dalam pengelolaan kawasan pesisir DKI Jakarta.

Kata kunci: *Tata kelola Kolaboratif, Manajemen Perkotaan, Perubahan Iklim*

Abstract

Climate change and global warming affects some coastal area in the world. This paper is done to analyze how the coastal area management is in DKI Jakarta Province, Indonesia by collaborative governance approach. To answer the question, author uses a qualitative method, that very useful to give a comprehensive explanation about the study. In the end, author suggest 4 scenarios of collaborative governance action that should be done by multi actors in DKI Jakarta coastal area management.

Keywords: *Collaborative Governance, Urban Management, Climate Change*

PENDAHULUAN

Pemanasan global dan perubahan iklim telah mengakibatkan beberapa dampak yang saat ini dapat dirasakan bersama oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat perkotaan yang berada di wilayah tropis. Dampak pemanasan global dan perubahan iklim membawa dampak kepada naiknya permukaan laut akibat meningkatnya suhu permukaan bumi. Naiknya permukaan air laut diakibatkan karena mencairnya lapisan es yang berada di kutub utara, maupun kutub selatan. Naiknya permukaan air laut juga menyebabkan adanya banjir air rob yang menerjang kawasan pesisir atau pinggir laut.

Indonesia tidak terlepas dari permasalahan yang diakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini nyata dapat dilihat dari adanya banjir rob di beberapa kawasan pesisir utara di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta, Bekasi, Pekalongan, Semarang, hingga ke Gresik (Greenpeace Indonesia dan Watchdoc, 2021). Salah satu kawasan yang terdampak paling parah adalah pesisir utara DKI Jakarta. Beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir air rob di kawasan utara Jakarta adalah Muara Baru, Muara Karang, Ancol, Luar Batang, Pluit, Cilincing, dan Marunda. Kasus banjir rob terjadi hampir setiap periode pasang laut yang tinggi. Terbaru banjir rob melanda kawasan pesisir utara Jakarta pada bulan Januari-Februari 2021. Permasalahan banjir rob di DKI Jakarta ditambah dengan persoalan penurunan permukaan tanah akibat masifnya pembangunan dan penyedotan air tanah secara besar-besaran di kota Jakarta. Selain permasalahan masifnya pembangunan, terdapat pula beberapa sebab alami, yaitu empat puluh persen atau 24.000 hektar dari wilayah DKI Jakarta berada di bawah permukaan laut pasang (Mirah Sakethi, 2010).

DKI Jakarta sebagai statusnya sebagai ibukota negara memerlukan perlakuan khusus, hal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari pemanasan global dan

perubahan iklim yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Selain itu, hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa objek vital nasional yang berada di pesisir utara DKI Jakarta, seperti: PLTU Muara Karang yang menyuplai listrik wilayah DKI Jakarta, pelabuhan peti kemas Tanjung Priok (Jakarta International Container Terminal) tempat bersandarnya kapal untuk arus ekspor impor barang; beberapa kawasan industri dan kawasan berikat yang menunjang perekonomian, baik nasional maupun internasional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang masif dan progresif di DKI Jakarta menyebabkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menjadi yang tertinggi di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi faktor yang berkontribusi sebagai tekanan terhadap lingkungan hidup di DKI Jakarta.

Permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim tentu saja harus menjadi perhatian dan fokus yang serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain kepentingan nasional dalam skala besar, kepentingan lokal dalam skala yang lebih mikro juga harus diperhatikan. Hal ini tertuju kepada masyarakat pesisir yang terdampak banjir rob yang melanda pesisir utara Jakarta. Jika para pebisnis atau pemodal besar dapat memindahkan rumah atau lokasi usaha yang terdampak banjir rob dengan mudah karena ketersediaan modal, tidak sama kondisinya dengan masyarakat pesisir, yang umumnya berpenghasilan rendah yang memiliki mata pencaharian nelayan, dan pedagang kecil.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejatinya tidak tinggal diam, terdapat beberapa kali upaya teknis dan kebijakan untuk mengurangi dampak banjir rob di wilayah pesisir DKI Jakarta. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah membangun tanggul laut sebagai tembok pembatas atau penghalang masuknya air laut ke permukiman masyarakat. Selain tanggul laut, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir yang disebabkan karena curah hujan dan kiriman dari hulu juga telah dilakukan, yaitu dengan membangun Kanal Banjir Timur yang membentang dari Cililitan hingga Marunda yang bermuara di Laut Jawa. Selain infrastruktur, program kebijakan yang secara reguler dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah normalisasi sungai.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut telah memberikan dampak bagi masyarakat Jakarta, namun persoalan banjir, terutama banjir rob di wilayah pesisir perlu segera diatasi karena masih terjadi hingga saat ini. Menurut peneliti, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki keterbatasan, baik dari segi anggaran, keilmuan, pengetahuan, dan keahlian. Hal ini membuat upaya penanggulangan banjir rob di kawasan pesisir utara DKI Jakarta memerlukan tata kelola kolaboratif berbagai pihak (selain pemerintah).

METODE PENELITIAN

Pendekatan merupakan cara pandang bagi seorang peneliti dalam mengamati atau melihat realitas atau permasalahan sosial. Cara pandang tersebut didasari oleh asumsi dasar yang ada dan berkembang pada ilmu sosial (Prasetyo dan Jannah, 2005). Pendekatan yang digunakan dalam paper ini adalah pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif jawaban atas pertanyaan mengenai manajemen kawasan pesisir di DKI Jakarta. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang tepat untuk makalah ini karena memungkinkan peneliti untuk dapat menggali hal-hal yang tidak dapat ditemukan melalui pengukuran statistik. Peneliti menggunakan cara pengumpulan data berupa studi literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang bersinggungan dengan topik makalah ini, seperti dokumen-dokumen resmi pemerintah, artikel ilmiah, yang kemudian dianalisis untuk mengurai jawaban atas rumusan masalah.

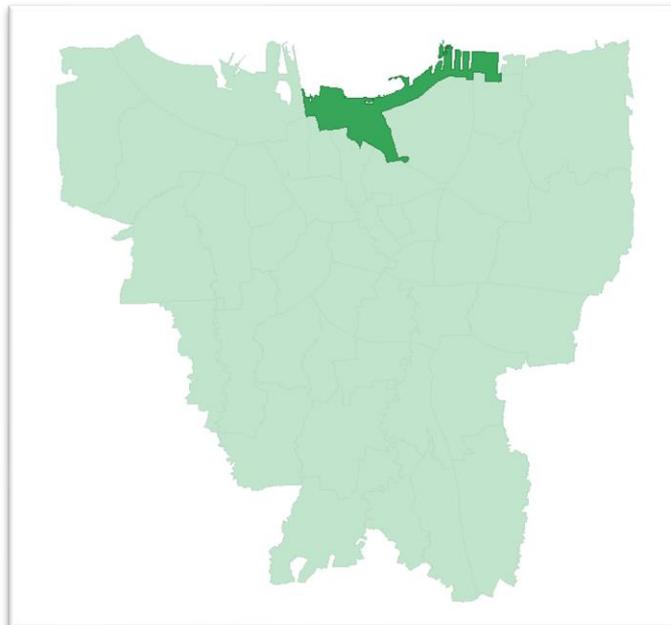
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak era pendudukan perusahaan dagang Hindia Belanda (VOC), DKI Jakarta (dahulu Batavia) telah mengalami banjir yang menerjang kota Batavia. Menurut catatan Sakethi (2010), banjir yang terjadi di Batavia pertama tercatat sejarah pada tahun 1621. Saat itu banjir terjadi sesaat setelah selesainya pembangunan kanal yang membelah Batavia. Kasus banjir besar selanjutnya terjadi pada tahun 1654, 1872, 1909, dan 1918. Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta tidak terjadi pada akhir-akhir ini saja, namun sudah pernah terjadi pada masa lampau.

Pada makalah ini, lokasi yang peneliti jadikan sampel adalah Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Kecamatan Pademangan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Jakarta Utara yang hanya memiliki tiga kelurahan, yaitu: Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur dengan masing-masing luas 3,77 km², 3,53 km², dan 2,61 km² dengan total luas sebesar 11,92 km². Jumlah penduduk yang bermukim di Kecamatan Pademangan adalah 169.102 jiwa. Batas-batas kecamatan Pademangan sebelah utara langsung berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kali Opak, sebelah timur berbatasan dengan Kali Sunter, dan sebelah selatan berbatasan dengan rel kereta api Kemayoran. (BPS Jakarta Utara, 2019).

Fasilitas-fasilitas yang tersedia di Kecamatan Pademangan sesuai dengan standard kecamatan pada umumnya di wilayah DKI Jakarta. Sesuai dengan catatan statistik dalam Kecamatan Pademangan dalam Angka tahun 2019, fasilitas yang ada di kecamatan Pademangan yaitu fasilitas pendidikan berupa SD sebanyak 53 buah; SMP 40 buah; SMA 7 buah; SMK 2 buah; dan Perguruan Tinggi sebanyak 1 buah. Fasilitas kesehatan juga tersedia dengan cukup di kecamatan Pademangan: jumlah Rumah Sakit yang tersedia berjumlah 1 buah, poliklinik berjumlah 20 buah, dan puskesmas berjumlah 4 buah; posyandu 41 buah, dan apotek 15 buah. Sedangkan tenaga kesehatan yang menjalankan fasilitas kesehatan tersebut berupa dokter yang tersedia berjumlah 37 orang, sedangkan bidan berjumlah 10 orang (BPS Jakarta Utara, 2019).

Sedangkan infrasturktur lainnya yang berada di Pademangan adalah infrastruktur rumah tinggal yang berupa rumah susun yang berjumlah 2 dan apartemen yang berjumlah 3 buah. Sedangkan instalasi pengolahan sampah yang ada di Pademangan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berjumlah 3 buah, masing-masing kelurahan memiliki TPS (BPS Jakarta Utara, 2019).



Gambar 1. Peta Kecamatan Pademangan dalam Peta DKI Jakarta. Sumber: Data *shapefile* kecamatan DKI Jakarta, diolah sendiri.

Kegiatan ekonomi di wilayah Kecamatan Pademangan memiliki bentuk yang beragam, seperti pedagang, buruh di beberapa pabrik atau kawasan industri. Di kecamatan Pademangan juga menjadi lokasi berdirinya Dunia Fantasi (Dufan) dan Taman Impian Jaya Ancol. Ragam fasilitas hiburan juga tersedia di Pademangan, seperti gedung bioskop yang berjumlah 1 buah, pentas kesenian berjumlah 3 buah, taman terbuka berjumlah 9 buah,

diskotik berjumlah 2 buah, kedai kopi 4 buah, klub malam 2 buah, spa 2 buah, dan panti pijat 5 buah (BPS Jakarta Utara, 2019).

Kecamatan Pademangan dijadikan sampel karena data yang ditampilkan menunjukkan bahwa kawasan tersebut secara berkala mengalami banjir, baik banjir rob maupun banjir dari curah hujan. Berikut ditampilkan data yang peneliti ambil dan kemudian olah dari Peta Informasi Banjir Jakarta, 2020:

Tabel 1. Data Lokasi Banjir di Kecamatan Pademangan

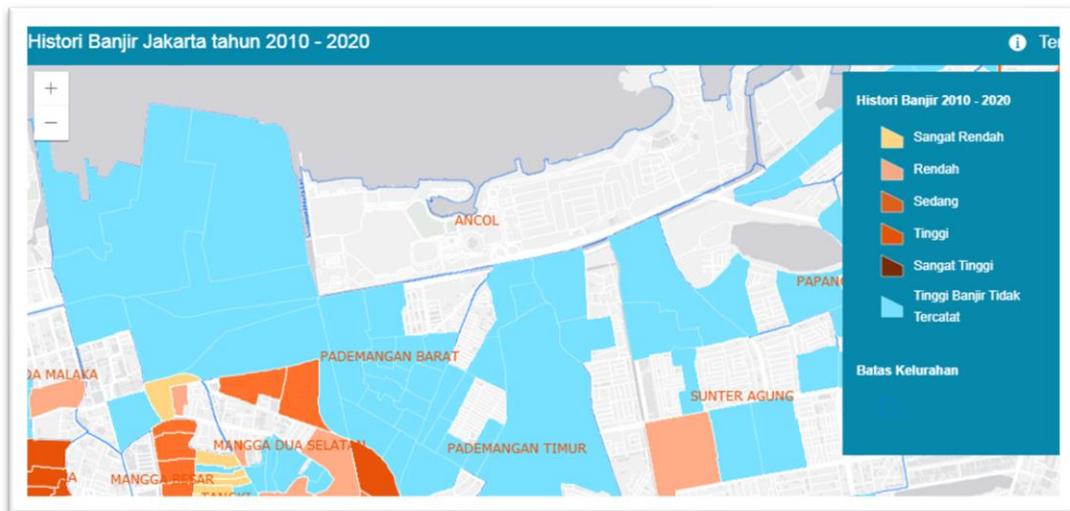
Tahun	Kelurahan	RW	KK Terdampak	Keterangan
2020	Pademangan Barat	15	1051	curah hujan tinggi, pompa kurang berfungsi, drainase tidak baik
2020	Pademangan Barat	10	581	curah hujan tinggi, pasang air laut
2020	Pademangan Barat	7	1019	curah hujan tinggi, penyumbatan saluran air
2020	Pademangan Barat	6	210	curah hujan tinggi
2020	Pademangan Barat	4	200	curah hujan tinggi, kali tidak menampung air hujan
2020	Pademangan Barat	3	100	jalan rendah, saluran tidak lancar
2020	Pademangan Barat	5	100	curah hujan tinggi
2020	Pademangan Barat	8	847	curah hujan tinggi
2020	Pademangan Barat	13	50	saluran air tidak maksimal
2020	Pademangan Barat	12	738	N/A
2013	Pademangan Timur	1	11	curah hujan tinggi
2020	Pademangan Timur	11	300	curah hujan tinggi
2020	Ancol	8	N/A	luapan kali, rob
2020	Ancol	1	N/A	luapan kali, rob
2020	Ancol	11	N/A	luapan kali, rob
2020	Ancol	2	118	luapan kali, rob
2020	Ancol	4	172	luapan kali, rob
2020	Ancol	5	N/A	luapan kali, rob

Sumber: Peta Informasi Banjir Jakarta, 2020

Pada Peta Informasi Banjir Jakarta juga menampilkan sebaran lokasi wilayah banjir yang terjadi dalam rentang tahun 2010-2020. Data yang ditampilkan pada Tabel 1 menunjukkan adanya kejadian banjir pada tahun 2013 dan 2020 di wilayah Kecamatan Pademangan. Secara visual, sebaran wilayah banjir ditunjukkan pada Gambar 2 disertai dengan keterangan warna yang menunjukkan ketinggian dari permukaan banjir.

Hal menarik yang terjadi di Pademangan adalah wilayah kelurahan Pademangan Barat dan Pademangan Timur mengalami beberapa kali banjir, sedangkan sebagian kelurahan Ancol tidak tercatat dalam peta mengalami banjir (Gambar 2). Sebagian wilayah kelurahan Ancol yang tidak tergenang masuk ke dalam wilayah kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Hal ini dapat dipahami karena Ancol telah melakukan pengurukan tanah di lokasi

tempat berdiri Dufan dan Taman Impian Jaya Ancol ini sehingga air laut tidak naik ke daratan sampai dengan batas pasang tertinggi.



Gambar 2. Peta Banjir di Kecamatan Pademangan Tahun 2020. Sumber: Peta Informasi Banjir Jakarta, 2020

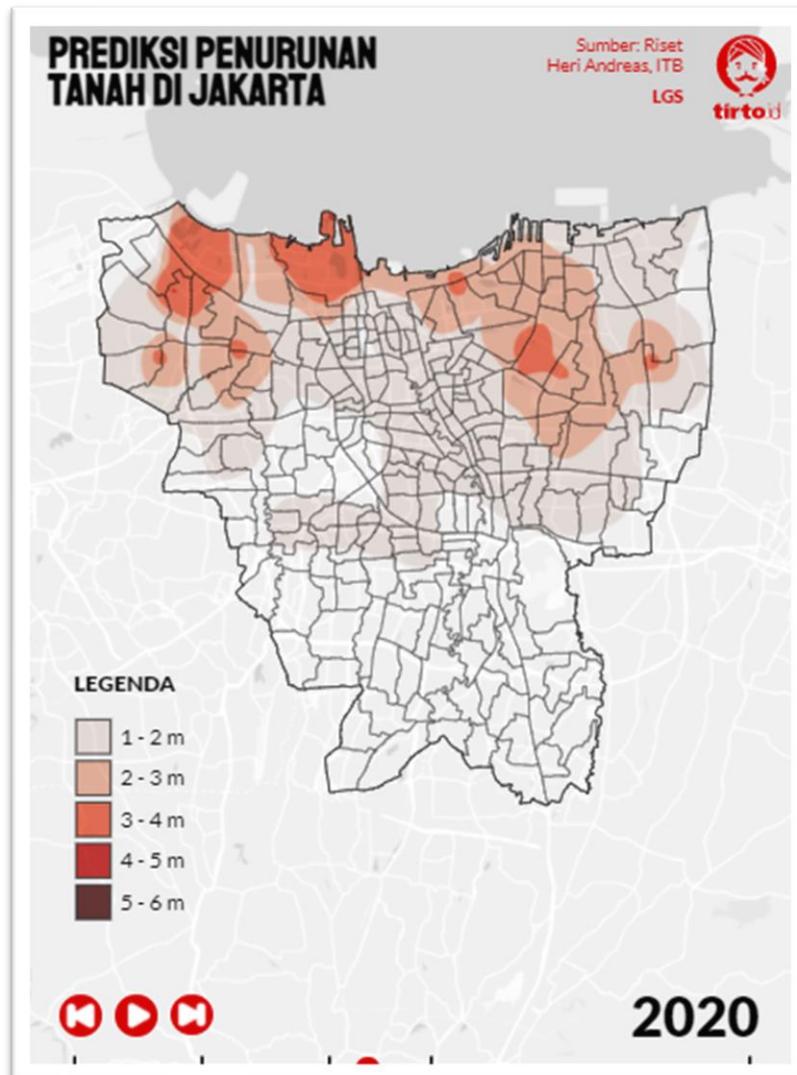
Pada bagian analisis pembahasan ini kita akan berfokus kepada permasalahan yang ada di Pademangan, yaitu: banjir. Secara umum, terdapat dua penyebab yang berbeda dari banjir Pademangan, yaitu banjir rob, dan banjir hujan. Banjir rob terjadi akibat naiknya permukaan air laut ke daratan, sedangkan banjir hujan adalah banjir yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan ditambah dengan ketidakmampuan infrastruktur untuk menampung air hujan sehingga menyebabkan genangan dan banjir.

Kondisi banjir di Pademangan diperparah dengan adanya kondisi penurunan permukaan tanah yang terjadi di hampir seluruh wilayah Jakarta, khususnya pesisir utara. Penurunan tanah yang terjadi menyebabkan beberapa dampak, seperti kerusakan infrastruktur berupa amblesnya jalan dan trotoar yang terjadi di wilayah Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Permasalahan penurunan permukaan tanah merupakan hal yang kompleks. Untuk mengurangi laju penurunan permukaan tanah tersebut sangat diperlukan adanya intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti pengaturan secara ketat penyedotan air tanah oleh rumah tangga maupun industri, menyediakan alternatif sumber-sumber air baku yang baru. Penyediaan alternatif air baku yang baru dapat berarti kebutuhan air bersih dipasok dari sumber yang baru, salah satunya melalui proses desalinasi atau melalui proses daur ulang air.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil langkah tegas, sekaligus inovatif dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu, kebijakan yang diambil harus benar-benar bijak. Kondisi kawasan pesisir yang mayoritas didiami dan dihuni oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu membutuhkan intervensi pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah juga memiliki keterbatasan, dari segi pendanaan, keilmuan, dan sumber daya manusia, oleh sebab itu, Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, melainkan harus melibatkan pihak lainnya untuk menuntaskan masalah ini.

Pihak yang dapat diajak kolaborasi oleh pemerintah tentu saja adalah swasta, unsur swasta dalam hal ini tentu saja dapat berasal dari bidang konstruksi, pengembang perumahan, maupun pengelola kawasan wisata. Kemampuan, keahlian serta pengetahuan yang dimiliki oleh swasta diharapkan dapat membantu upaya pemerintah untuk menuntaskan masalah ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta juga dapat memberikan alternatif bentuk dan sumber pendanaan. Selain itu, budaya efektif dan efisien di swasta dapat dimanfaatkan untuk menemukan solusi atas permasalahan.

Selanjutnya, peneliti mencoba mengarahkan analisis ini kepada beberapa skenario atau model kebijakan yang dapat diterapkan. **Skenario pertama** adalah kawasan pesisir yang rawan tenggelam sebaiknya dialihfungsikan menjadi kawasan hutan bakau. Selain kondisi tanah yang cocok untuk ditanam dan menjadi tempat tumbuh bagi hutan bakau, kawasan ini juga telah tidak ideal bagi masyarakat untuk hidup dan tinggal. Hutan bakau dapat mencegah abrasi dan masuknya air laut ke dalam area daratan, sehingga area daratan tidak tergerus dan berkurang oleh air laut.



Gambar 3. Peta Prediksi Penurunan Tanah DKI Jakarta. Sumber: Andreas (2015) dalam Zuhra (2020)

Data pada Gambar 3 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah DKI Jakarta, termasuk wilayah Kecamatan Pademangan mengalami permasalahan penurunan tanah. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kawasan pesisir telah demikian sakit sehingga harus dikembalikan fungsi dan keadannya sehingga eksistensi kawasan pesisir dapat berkelanjutan keberadaannya. Skenario ini meninggalkan sebuah catatan yang krusial, yaitu bagaimana memindahkan sebagian banyak masyarakat tentu saja membutuhkan biaya yang besar dan juga membutuhkan tempat baru yang cukup luas? Tahap inilah yang membutuhkan adanya tata kelola kolaboratif antar pihak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan penting dalam skenario ini, Pemprov DKI berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam merelokasi warga ke tempat yang baru. Tentu, perlu adanya keberpihakan terhadap warga atas berbagai

kebijakan pemerintah. Relokasi masyarakat tidak sesederhana memindahkan orang dan barang, namun juga terdapa beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tempat relokasi yang baru sebaiknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal sebelumnya agar tidak terlalu jauh mengakses dari dan menuju tempat bekerja.

Tata kelola kolaboratif sangat diperlukan pada skenario ini. Pendekatan kolaboratif dilakukan karena Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan seluruh tahap implementasi kebijakan. Pihak selain pemerintah juga harus ikut terlibat dalam pelaksanaan relokasi dan rehabilitasi lahan kritis pesisir. Swasta, dalam hal ini kontraktor dapat membantu membangun hunian baru yang bersih, representatif, dan sehat bagi masyarakat yang telah direlokasi. Ruang terbuka hijau juga harus disediakan agar hunian relokasi tersebut dapat hidup dan bernafas. Ruang terbuka tersebut juga dapat berfungsi sebagai ruang sosialisasi bagi warga masyarakat.

Selain pihak swasta, pihak akademisi juga turut dilibatkan dalam scenario kebijakan pertama ini. Akademisi dilibatkan dalam upaya pemulihan lahan kritis dalam bentuk penanaman hutan bakau. Perkembangan perbaikan lahan kritis tersebut harus dipantau sebagai bentuk monitoring dan sebagai bahan analisa akademik. Selain difokuskan sebagai lahan perbaikan, lahan hutan bakau juga dapat dikelola sebagai tempat wisata edukasi yang terbuka untuk umum. Dalam upaya pengembangan sebagai tempat wisata edukasi, swasta dapat ikut berperan serta dalam rangka membantu pengembangan konsep dan desain.

Skenario kedua adalah melakukan pembangunan hunian dan permukiman masyarakat yang berbasis kepada “kota air”. Hal ini yang paling mungkin untuk dilakukan. Selama ini paradigma pembangunan kita adalah melawan atau membelakangi air. Padahal, air adalah sahabat manusia yang keberadaannya harus diatur secara berkelanjutan. Salah memahami tentang air akan berujung kepada kesalahan-kesalahan paradigma dan teknis yang ada dalam program pembangunan. Pola pikir yang harus ditumbuhkan adalah menyadari bahwa Jakarta berada di bawah permukaan laut, ditambah dengan kenyataan bahwa beberapa wilayah di pesisir Jakarta khususnya mengalami penurunan tanah yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Paradigma kota air ini juga menunjukkan bahwa air sebagai sahabat yang harus diperhatikan kondisi dan keberlanjutannya. Paradigma pembangunan kota air juga harus diperhatikan sampai ke hal teknis dan detail, seperti rancang bangunan di kawasan pesisir tersebut, seperti dibangun secara semi mengapung dan atau dibangun seperti rumah panggung. Pengembangan paradigma ini harus diintervensi oleh pihak akademisi untuk membentuk kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Selain akademisi, kalangan profesional lain juga harus ikut berkolaborasi untuk mengembangkan aspek-aspek teknis dan detail bangunan dan lingkungan (lanskap).

Skenario ketiga adalah melalui pendekatan teknis, yaitu dengan melakukan beberapa rekayasa *engineering* untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk terjadi. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah membangun tanggul laut raksasa di kawasan pesisir Jakarta yang telah dilakukan beberapa kali oleh Pemerintah. Kawasan tanggul laut juga dibantu efektivitasnya dengan pengoperasian pompa untuk menguras air yang berada di sebelah dalam tanggul untuk kemudian dialirkan ke laut. Pompa ini juga memiliki peran sentral untuk mengeringkan wilayah dalam tanggul yang terdiri dari permukiman masyarakat.

Peneliti dapat mengatakan bahwa pembangunan tanggul merupakan alternative yang harus diletakkan paling terakhir. Karena pembangunan tanggul hanya mencegah namun tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Jika permukaan air laut makin naik, maka tanggul laut yang dibangun harus dibangun lebih tinggi kembali. Jika hal ini dilakukan, maka yang akan terjadi adalah semacam bom waktu yang mengintai warga masyarakat di pesisir. Risiko tanggul laut mengalami bocor atau jebol sangat mungkin terjadi.

Skenario keempat, mengenai kebijakan untuk mengatur atau mengurangi laju penurunan tanah. Pemerintah harus tegas mengatur mengenai penyedotan air tanah, baik oleh industri maupun rumah tangga. Penyedotan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan tanah mengalami kekosongan sehingga tekanan yang ada di permukaan tanah berupa aktivitas manusia memaksa tanah untuk terus turun secara perlahan. Untuk mengatasi

hal ini harus ada langkah kolaboratif untuk mencegah dan mengurangi risiko penurunan tanah yang lebih parah. Keterlibatan swasta tentu sangat diperlukan untuk membangun sumur-sumur resapan di sekitar gedung yang dikelola untuk menangkap air hujan yang kemudian disimpan di dalam tanah. Pemerintah harus tegas dan konsisten untuk menerapkan kebijakan kewajiban membangun sumur resapan oleh setiap gedung. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, Pemerintah dirasa perlu untuk menyiapkan sanksi bagi pengelola gedung yang tidak mengikuti peraturan.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, tata kelola kolaboratif menjadi faktor yang mendeterminasi dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan Kota Jakarta dalam mengelola air. Paradigma tata kelola kolaboratif juga peneliti ajukan sebagai ide dan perhatian utama dalam menyongsong pembangunan masa depan Indonesia dan DKI Jakarta khususnya (dan Ibu Kota Negara baru nantinya). Paradigma tata kelola kolaboratif merupakan konsekuensi logis dari kondisi fisiologis Indonesia sebagai negara besar dan majemuk yang mewujud sebagai organisme yang besar, jika kesesuaian antar fungsi dan tugas tidak berjalan dengan semestinya, maka berjalannya sebuah negara akan terganggu.

Setiap aktor yang ikut berkolaborasi memiliki peran yang sama-sama penting untuk menyelesaikan permasalahan. Pemerintah sebagai aktor utama, tanpa adanya *political will* Pemerintah, mustahil peluang kolaborasi akan tercipta dan terbuka. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus condong kepada masyarakat, atau dengan kata lain *pro poor* dan *pro job*. Swasta dapat berperan berkolaborasi melalui tata kelola yang efektif dan efisien dalam pengelolaan dan manajemen. Sumber daya yang dimiliki oleh swasta, seperti keahlian, profesionalitas, modal, dan fleksibilitas dinilai dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu asosiasi profesional dan keilmuan juga dapat memberi dukungan dari segi ilmiah dan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Jakarta Utara, (2019). *Kecamatan Pademangan dalam Angka 2019*. Jakarta Utara: Badan Pusat Statistik.
- Greenpeace Indonesia dan Watchdoc. (2021). *Tenggelam dalam Diam*. Diupload pada 27 Maret 2021 di kanal Youtube: Watchdoc Documentary: <<https://www.youtube.com/watch?v=v6hp3i2ydrI&t=2838s>>
- Mirah Sakethi, (2010). *Mengapa Jakarta Banjir? Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Online, available: <https://bpbd.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2020/10/buku_mjb-1.pdf>
- Peta Informasi Banjir Jakarta (2020). Online, available: <<https://jakartasatu.jakarta.go.id/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=80e851b3f9c3435b9f58f1ec0ca8f4a5>>
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zuhra, Wan Ulfa Nur. (2020). *Masalah Usang dan Runyam Penurunan Muka Tanah Jakarta*. Online, available: <<https://tirto.id/masalah-usang-dan-runyam-penurunan-muka-tanah-jakarta-fKwS>>